

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak orde lama sampai orde reformasi sekarang ini partai politik masih mempunyai kedudukan yang penting dalam ranah demokrasi. Ini berawal dari jatuh banggunya kabinet Soekarno-Hatta dikarenakan para menterinya tidak sejalan dalam membuat sebuah kebijakan untuk Negara. Hal ini dikarenakan para pembuat keputusan tersebut tidak menanggalkan pakaian partainya untuk membuat kebijakan yang menyangkut masyarakat, yang selalu menjadi pokok permasalahan para menteri tersebut adalah kebijakan yang dibuat itu tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan partai yang digawanginya sehingga sangat berat untuk memutuskan hal yang tidak bisa menguntungkan bagi partai politiknya dan dirinya sendiri. Setelah orde barupun partai politik juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan. Bahkan pada orde ini terdapat dua partai politik serta satu golkar yang menjadi tangan kanan pemerintah. Sedang pada masa reformasi sekarang ini penilaian masyarakat tentang partai politik sedikit bergeser karena kurang baiknya pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik tetapi partai politik tetap mendapat tempat terpenting dalam demokrasi.

Demokrasi menurut Diamond, Linz, dan Lipset merupakan sistem pemerintahan yang harus memenuhi tiga elemen yaitu¹: 1.) Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan

¹ Tunjung Sulaksono, S.IP, M.Si, Handout Pengantar Ilmu Politik, hal.3

pemerintah yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang regular dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa; 2.) Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan; 3.) Kebebasan sipil dan politik: kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Dari pendapat Diamond, Linz, dan Lipset ini menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu wadah untuk individu dan kelompok dalam meraih kekuasaan sehingga partai politik mempunyai andil yang besar dalam sistem demokrasi, karena partai politik merupakan elemen dasar yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena orang-orang dari partai politik inilah yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam membuat sebuah kebijakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Untuk itu pelaksanaan peran dan fungsi partai politik sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam hal ini fungsi partai politik seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, pengelola konflik, agregasi & artikulasi kepentingan, dan partisipasi politik.

Dalam perpolitikan Indonesia, partai politik merupakan mesin politik untuk menuju kekuasaan sehingga banyak orang dalam partai politik yang berambisi untuk menduduki jabatan publik. Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah banyaknya orang yang mengincar posisi dalam pemerintahan

tanpa mengetahui kapasitas yang dimilikinya. Hal ini terbukti masuknya para selebritis dalam kancah politik seperti Tantowi Yahya sebagai Caleg Partai Golkar, Lyra Virna di PPP, Edo Kondologit pada PDIP². Dengan masuknya aktor-aktor baru dari kalangan selebritis ini menunjukkan bahwa proses pendidikan politik dalam partai politik tidak berjalan dengan baik. Dengan adanya caleg selebritis semakin memperjelas ketidak siapan partai politik dalam menghadapi pemilu 2009 dan membuat citra partai politik kurang baik karena terkesan asal pilih serta memanfaatkan kepopuleran para selebritis untuk memperoleh dukungan massa.

Selain itu, terdapat pula konflik internal yang berujung pada pembuatan partai politik baru membuat masyarakat menjadi ragu pada partai politik sebab salah satu fungsi partai politik adalah sebagai pengatur konflik. Dalam kasus internal ini partai politik tidak bisa menjalankan fungsi tersebut tetapi malah membuat konflik itu semakin memuncak dengan adanya klaim atau pemecatan dengan alasan pengkhianatan ataupun kecewa dengan partai politik terdahulu karena gagal memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan. Sebagai contoh dapat kita lihat dari pecahnya partai politik atau dapat disebutkan sebagai konflik internal partai yang berujung pada pendirian partai politik seperti konflik di PPP yang akhirnya melahirkan Partai Persatuan (PP) dan PPP Reformasi, yang kemudian menjadi (Partai Bintang Reformasi (PBR). Pada bagian lain, konflik di PDIP melahirkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Indonesia Tanah Airku (PITA), Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR), dan

² <http://www.kapanlagi.com> : Caleg Artis Indikasi Masalah Pada Kaderisasi, 14 Agustus 2008

Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Konflik di Partai Golkar melahirkan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Konflik di PKB melahirkan Partai Kebangkitan Demokrasi (PKD) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Konflik di PAN melahirkan Partai Matahari Bangsa (PMB). Konflik di Partai Demokrat melahirkan Partai NKRI³.

Dari konflik internal partai politik yang menghasilkan partai baru ini membuktikan bahwa partai politik belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik terutama fungsinya sebagai pengendali konflik. Pada prinsipnya fungsi partai politik dalam pengendali konflik ini adalah untuk berusaha mengendalikan konflik yang ada dengan cara berdialog dan berkompromi, namun pada kenyataannya partai politik tidak bisa melaksanakan fungsi ini untuk internal mereka. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa partai politik belum bisa menerapkan fungsinya sebagai pengendali konflik untuk dirinya sendiri, sehingga bagaimana mungkin partai politik dapat mengendalikan konflik yang ada dalam masyarakat apabila partai politik tidak bisa menyelesaikan konflik internalnya.

Masyarakat sekarang ini mulai apatis tatkala parpol yang menjadi tumpuan aspirasi politik rakyat juga dinilai sebagai kelompok orang yang sekadar mencari ketenaran untuk menggapai iming-iming materi⁴. Hal ini sering terjadi ketika kampanye banyak kandidat mendekati masyarakat ketika hajatan politik

³ <http://www.inilah.com/berita/politik/2007/12/23/5279/waspadai-konflik-internal-parpol/>

⁴ Toto Suryaningtyas, Peran Parpol dalam Pemilu Dikurung... <http://www.pemilu-online.com/>, 26 Maret 2007

tiba, sehingga saat mendekati hajatan tersebut partai politik saling berlomba-lomba mendapatkan simpati masyarakat dengan pemberian sumbangan, mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan penggunaan motto supaya lebih diingat oleh masyarakat. Kurangnya pelaksanaan fungsi partai politik karena mereka disorientasi terhadap fungsi partai politik itu sendiri sehingga partai politik yang pada prinsipnya adalah penyalur aspirasi masyarakat kepada pimpinan hanya digunakan sebagai mesin politik dalam memperoleh kekuasaan guna memperkaya diri sendiri dan partainya.

Kecenderungan partai politik yang hanya bekerja saat pemilu membuat masyarakat sedikit kurang percaya terhadap partai. Seperti yang kita lihat pada iklan-iklan di televisi ada beberapa partai politik yang memasang iklan supaya masyarakat simpati dan akhirnya memilih partai tersebut, misalnya Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional dan lain sebagainya. Selain itu, semakin meningkatnya masyarakat yang golput, juga membuktikan bahwa masyarakat kurang percaya terhadap partai politik. Apalagi dengan banyak anggota partai yang tersandung masalah korupsi dan tindak amoral dapat membuat apatis masyarakat terhadap partai politik. Namun kecenderungan itu tidak terjadi dengan Partai Keadilan Sejahtera, dimana partai ini mampu melaksanakan kinerjanya bukan hanya ketika hajatan politik tiba. Karena dalam Partai Keadilan Sejahtera mempunyai tindakan yang konkret dalam pendidikan politik itu terbukti dari adanya target bahwa setiap satu kader Partai Keadilan Sejahtera harus membina 24 orang dalam menghadapi Pemilu 2009, dan ini tidak hanya terjadi baru-baru ini tetapi sudah dilaksanakan oleh PKS sejak tahun 1999.

Pada tahun 1999 PKS 1 kader harus membina 7 orang dan tahun 2004 1 kader membina 13 orang.⁵ Dari sini kita bisa melihat bahwa PKS mempunyai kesiapan dalam melaksanakan pendidikan politik karena PKS sebagai partai kader harus mampu menunjukkan pelaksanaan fungsinya secara stimulatif. Namun apakah keunggulan PKS dalam pendidikan politik itu juga diikuti dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik lainnya dengan baik juga. Melalui fenomena ini penulis ingin mengetahui seberapa baik tingkat pelaksanaan fungsi partai politik yang sudah dilaksanakan oleh PKS DPD Kabupaten Sleman dapat diterima oleh masyarakat. Penulis memilih PKS DPD Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman satu-satunya DPD yang memiliki Web sendiri dalam lingkup Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memiliki kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan penulis untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat penulis rumuskan berdasarkan latar belakang di atas adalah :

- 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi partai politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman?**
- 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik tersebut?**

⁵<http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2008/10/31/267/159263/pengamat-pks-lebih-konkret-dari-parpol-lain>

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui pelaksanaan fungsi partai politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera
- b) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Partai Keadilan Sejahtera
- c) Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera.

2 Manfaat Penelitian

- a) Meningkatkan pemahaman dan wacana tentang fungsi partai politik di Indonesia.
- b) Memberikan masukan kepada partai politik khususnya tentang pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan berdasarkan konsep atau definisi tertentu, sehingga akan tampak jelas sistematis dan ilmiah dalam melakukan penelitian⁶.

Teori adalah unsur penelitian yang paling besar perannya bagi penelitian, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang

⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989 hal. 34

menjadi pusat perhatiannya.⁷ Dari penjelasan tentang kerangka dasar teori dan teori maka kerangka dasar teori yang penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Secara umum partai politik dapat kita definisikan sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan tertentu.

Menurut pasal 1 UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. Menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sedang Partai politik menurut para tokoh adalah sebagai berikut:

- 1) Carl J. Friedrich ⁸: Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, trough such control ideal and material benefits and advantages*)

⁷ Ibid. hal. 37

⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), . hal. 404

- 2) Edmund Burke ⁹: partai politik ialah sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.
- 3) Leon D. Epstein dalam bukunya *Political Parties in Western Democracies*¹⁰ menjelaskan bahwa partai politik adalah satu kelompok pengejar kedudukan pemerintah, yang secara bersama-sama terikat pada identitas ataupun label yang dimilikinya. Suatu identitas, nama ataupun label politik, paling tidak bisa menunjukkan karakteristik partai politik itu sendiri, baik yang menyangkut besarnya, tingkat integritasnya, ataupun jumlah pendukungnya.
- 4) Sigmund Neuman¹¹: Partai politik merupakan organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam hal ini partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah resmi. (*A political party is the articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views*)
- 5) Giovanni Sartori¹²: Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
- 6) George R. de Huszar dan Thomas H. Stevenson ¹³: Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan.
- 7) Mark N. Hagopian : “Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”¹⁴

⁹ Cheppy Haricahyono, Ilmu Politik dan perspektifnya, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal. 192

¹⁰ Ibid, hal. 193

¹¹ Miriam Budiardjo, Loc.cit.hal. 404

¹² Miriam Budiardjo, Loc.cit. hal. 404

¹³ Ulung Pribadi, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Politik, IP, Fisipol, UMY, 1996, hal.43

¹⁴ Mark N. Hagopian, “*Regimes, Movements, and Ideologies*”. New York and London Longman, 1978.

Dari pengertian partai politik menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu kedudukan dalam sebuah pemerintahan. Sehingga munculnya partai politik ini bukan suatu hal yang dipaksakan sebab dengan adanya partai politik berarti seseorang mendapatkan kemudahan mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan, dengan kata lain partai politik adalah alat untuk individu memperoleh dukungan dalam menduduki jabatan pemerintah.

b. Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah memberikan proses pendidikan bangsa khususnya untuk generasi bangsa, dan memberikan suatu proses pembangunan baik pembangunan politik maupun ekonomi.

c. Tujuan Partai Politik¹⁵

- a. Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik (output pada umumnya)
- b. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, kelakuan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama jika mayoritas pemerintah tidak berada di pihaknya)

¹⁵ Drs. Haryanto, Partai politik Suatu tinjauan umum. Liberty Yogyakarta, 1984 , hal. 123

- c. Berperan sebagai pemadu (*Streamlining*), dalam hal ini partai politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat dicerna dan diterima masyarakat.

Dari ketiga tujuan partai politik diatas dapat kita artikan bahwa pada hakekatnya partai politik merupakan mesin politik yang digunakan untuk mencapai kedudukan dalam pemerintah namun kedudukan itu tidak semata-mata hanya menjadi wakil partai politik saja dalam ikut serta membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut merupakan representatif dari masyarakat yang harus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat secara umum menjadi sebuah kebijakan yang tepat. Selain itu juga wakil tersebut juga harus bisa menjadi pengawas setiap kebijakan yang bertentangan dan dapat menyensasikan masyarakat sehingga adanya wakil tersebut apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat dapat didengar dan direalisasikan dengan baik tanpa adanya penyelewengan.

2. Fungsi Partai politik

Sehubungan adanya pemisahan fungsi partai politik menurut bentuk negaranya maka penulis memilih, fungsi partai politik¹⁶ sebagai berikut:

- 1) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
- 2) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik
- 3) Partai politik sebagai sarana pengelola konflik
- 4) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- 5) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan
- 6) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik¹⁷

Untuk lebih memahami fungsi-fungsi partai politik yang ada maka penulis akan menjabarkan mengenai sedikit penjelasan fungsi partai politik sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Menurut seorang ahli sosiologi politik M.Rush (1992)¹⁸:

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik
(Political socialization may be defined is the process by which individuals in a given society become acquainted with the political system and which to a certain degree determines their perceptions and their reactions to political phenomena)

¹⁶ Mahrus Irsyam dan Lili Romli, *Menggugat Partai Politik*, Laboratorium Ilmu Politik Fisipol, UI, 2003, hal.141

¹⁷ Tunjung Sulaksono, *Op.Cit*,

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Op.cit*. hal. 407

Sosialisasi politik¹⁹ menurut Dennis Kavanagh dalam *Political Culture* menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat.

Dari kedua pendapat para ahli di atas dapat kita ketahui inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai-nilai politik, masalah politik, supaya masyarakat dapat memahami politik dan akhirnya mereka dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik itu sendiri atau minimal mereka ikut partisipasi ketika pemilu. Dalam proses ini secara tidak langsung partai politik sudah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik karena partai politik melakukan sebuah proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Di Negara-negara berkembang kegiatan partai politik sebagai sarana sosialisasi politik bagi masyarakat, hanya sebatas pemberian pemahaman mengenai ideologi partai saja dan partai melakukan sosialisasi pada masyarakat saat mendekati pesta demokrasi. Padahal sosialisasi pada masyarakat itu adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik secara berkelanjutan supaya memberikan kesadaran politik pada masyarakat yang berdampak pada keikutsertaan masyarakat dalam ranah politik baik sebagai pengamat, ataupun sebagai lakon dalam kancah perpolitikan.

¹⁹ Drs. Haryanto, Partai politik Suatu tinjauan umum. Liberty Yogyakarta, 1984

2. Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran-peran politik aktif²⁰. Czudnowski juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:

- a. *Social Background*, artinya faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang calon elit dibesarkan.
- b. *Political Socialization*, di mana melalui sosialisasi politik seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- c. *Initial Political Activity*, di mana faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.
- d. *Apprenticeship*, di mana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, di mana di sini calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas sajanamun dinilai

²⁰ Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi” Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, hal.101

pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

- f. *Motivations*, di mana hal ini merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses dimana masyarakat mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Selain itu dapat diartikan sebagai seleksi & pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partai politik sebagai pengelola konflik

Mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawanya ke parlemen untuk mendapatkan penyelesaian melalui keputusan politik.

4. Partai politik sebagai sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik yaitu Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik harus dapat berperan sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat kepada penguasa maupun kebijakan dari penguasa untuk masyarakat. Dari fungsi partai politik yang seperti ini maka partai harus bersikap

netral untuk meminimalisir kebijakan yang objektif dan memberatkan sebelah pihak.

5. Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan

Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginput-an berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

Agregasi Kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.

Dapat disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di Negara yang menganut paham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem politik dan partai politik sendiri.

6. Partai politik sebagai sarana Partisipasi Politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan

keputusan yang dilakukan pemerintah²¹. Sedang menurut Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Serta partisipasi ini bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau *sporadic*, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.²²

Jadi partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam kegiatan yang ada dalam sistem politik. Selain itu partisipasi politik dapat kita definisikan sebagai Kegiatan Warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintahan.

Partisipasi politik sendiri dibagi menjadi dua jenis antara lain²³:

- a. *Autonomous Partisipation* adalah partisipasi dari masyarakat yang muncul dari dalam diri mereka sendiri berdasarkan kesadaran individu karena pendidikan tinggi, ekonomi yang cukup dan ketergantungan yang rendah.
- b. *Mobilized Partisipation* adalah partisipasi yang dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dan bukan karena kesadaran mereka sendiri, biasanya fenomena ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap pemerintah yang tinggi, mendapat tekanan dan pendidikan yang rendah. Dalam hal ini partai politik adalah wadah warga negara untuk berpartisipasi politik.

²¹ Ibid., hal 97

²² Loc.Cit.hal. 97

²³ Pius A Partanton, M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arloka Surabaya, 1994, hal. 572

3. Jenis-jenis Partai

Partai politik menurut komposisi dan fungsi keanggotaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu²⁴:

a. Partai Massa (*Mas Party*)

Partai massa merupakan sebuah partai yang kekuatannya berasal dari keunggulan anggotanya sehingga partai ini terdiri dari pendukung-pendukung yang berasal dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bergabung di bawahnya guna memperjuangkan program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai ini adalah masing-masing aliran cenderung memaksakan kepentingan masing-masing sehingga jika terjadi perselisihan pendapat sangat mudah sekali anggotanya mengundurkan diri dan berpotensi untuk mendirikan partai baru.

b. Partai Kader (*Cadre Party*)

Partai kader adalah sebuah partai yang mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja anggotanya, sehingga pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya.

²⁴ Miriam Budiardjo, Op.cit. hal.166

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi-Fungsi

Partai Politik

Menurut pendapat Duverger yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi partai politik adalah hubungan ideologi dengan anggota dan struktur partai.

Sedang menurut R. Michles, kecenderungan sikap pemimpin partai dengan organisasinya adalah yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik hal ini berbeda dengan Kenneth Janda yang menggunakan metode komparatif, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dalam sepuluh aspek kehidupan kepartaian yaitu institusi, orientasi isu, dukungan masyarakat, kompleksitas organisasi, sentralisasi kekuasaan, otonomi, koherensi, *involvement*, strategi dan praktik, dan status dalam pemerintahan.

Namun untuk memahami penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik secara mendalam dapat kita lihat dari tiga faktor, antara lain²⁵:

1) Sosok partai politik

Sosok partai politik ini adalah kekuatan politik yang utama supaya dapat memobilisasi massa sehingga pelaksanaannya ditentukan oleh empat faktor secara internal. *Pertama*, organisasi dan kelembagaan. Ini berkaitan dengan sikap dasar yang dimiliki

²⁵ Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Op.cit, hal. 3-4

oleh anggota partai politik itu sendiri yaitu kedisiplinan anggota dalam hal ini anggota tidak hanya disiplin saat pemimpin itu ada, kemandirian pengurus partai politik, sentralisasi organisasi, loyalitas, ketergantungan donatur akibatnya kepentingan masyarakat tidak dapat tersalurkan sebab keputusan partai mendapat intimidasi dari donatur sehingga partai politik hanya mewakili golongan tertentu. *Kedua*, kepemimpinan partai. Kepemimpinan merupakan kekuatan dalam mengelola dan menentukan arah perjalanan partai politik sehingga kepribadian pemimpin harus unggul supaya dapat membawa partai untuk menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan amanat rakyat. *Ketiga*, Ideologi partai. Maksudnya ideologi ini dimanfaatkan sebagai penentu proses politik yang terdiri dari interaksi kegiatan politis intra dan ultra antar partai, atau sebagai kamufase motivasi aktor politik. *Keempat*, strategi dan taktik dapat diartikan sebagai perjuangan menyeluruh untuk mewujudkan tujuan politik tertentu secara utuh melalui kiat atau cara perjuangan.

2) Sistem partai politik

Sistem partai adalah suatu set partai politik yang beroperasi di dalam suatu bangsa dalam sebuah pola pengorganisasian dan terwujudkan oleh sejumlah sistem properti partai seperti koalisi, kelangsungan pemerintah, disproportionalitas pemilih, sejumlah dimensi isu, dan sejumlah partai efektif. Sistem partai politik yang

digunakan ialah sistem multi partai. Yang mana sistem ini bagi masing-masing partai untuk mendorongnya menjadi organisasi politik rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat.

3) Basis sosial partai

Basis sosial adalah tatanan nilai dan kepentingan masyarakat berupa kelompok dan organisasi yang menformasikan masyarakat sehingga berguna bagi partai untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya politik.

Dari beberapa pendapat para ahli dan kesimpulan yang dipaparkan oleh Arbi Sanit dalam buku menggugat partai politik maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan partai politik dapat kita kelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal yang terdiri dari kepemimpinan partai, ideologi partai, sikap pengurus partai politik (Kemandirian, loyalitas, kedisiplinan) dan faktor eksternal terdiri dari sistem partai, serta basis sosial partai . Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik yang sangat menentukan adalah dari faktor internal karena melalui faktor internal inilah akan terlihat arah sebuah partai apakah partai tersebut akan menjalankan amanat dari masyarakat dengan tindakan nyata melalui realisasi fungsi-fungsi partai politik atau partai politik hanya menjadi mesin politik sekelompok orang untuk mendapatkan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri.

E. Definisi Konseptual

1. Partai Politik

Partai politik merupakan kumpulan individu yang mempunyai tujuan, visi, dan misi yang sama untuk mencapai sebuah kedudukan dalam pemerintahan.

2. Pelaksanaan Fungsi Politik

Pelaksanaan fungsi partai politik merupakan sebuah wujud nyata atau realisasi dari fungsi partai politik yang sudah ada seperti sosialisasi politik, pengatur konflik, komunikasi politik, pengendali politik dan rekrutmen politik.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel²⁶. Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variabel apa saja yang dapat digunakan untuk membantu sebuah penelitian.

1. Indikator-indikator dari pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik antara lain sebagai berikut:
 - 1) Partai politik sebagai sarana Sosialisasi Politik
 - a. Usaha pencitraan partai.
 - b. Menjelaskan visi-misi partai politik kepada masyarakat.
 - c. Memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989 hal. 23

- d. Sarana memobilisasi massa.
 - e. Pembentukan nilai-nilai politik guna mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam sistem politik
- 2) Partai politik sebagai sarana Rekrutmen Politik
- a. Memberian kesempatan menduduki suatu jabatan dalam politik.
 - b. Sarana menanamkan ideologi partai.
 - c. Penyeleksian seseorang berdasarkan pendidikan dan kemampuannya sebagai pemimpin baik pemimpin partai maupun pemimpin nasional.
 - d. Mendirikan organisasi massa untuk menjamin kelanjutan partai.
- 3) Partai politik sebagai sarana pengelola konflik
- a. Penerapan fungsinya sebagai mediator untuk mengatasi masalah antara masyarakat dan pemerintah.
 - b. Sebagai sarana meminimalisir konflik dengan menyamakan tujuan dan menghargai perbedaan
- 4) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- a. Media penghubung antara masyarakat dan pemerintah
 - b. Sarana untuk menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

- 5) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan
 - a. Adanya kebijakan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - b. Pemberi masukan pada pemerintah melalui aspirasi rakyat yang dibawa oleh partai politik.
 - 6) Politik Partai politik sebagai sarana Partisipasi Politik
 - a. Usaha individu yang terorganisir untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijakan.
 - b. Bentuk keikutsertaan masyarakat baik secara pasif ataupun aktif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut²⁷:
- a. Faktor Internal Partai
 - 1) Sikap pemimpin partai politik
 - 2) Kedisiplinan pengurus partai politik
 - 3) Kemandirian partai politik
 - 4) Loyalitas pengurus partai
 - 5) Strategi atau taktik partai politik
 - b. Faktor Eksternal Partai
 - 1) Basis Partai
 - 2) Sistem Partai Politik

²⁷ Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Op.cit, hal. 3-4

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.

Menurut Winarno Surachmad²⁸:

Penelitian deskriptif adalah istilah umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview, kuesioner, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan menurut Masri S. dan Sofyan E²⁹. Penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan, yaitu :

- Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
- Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu umpamanya interaksi sosial, sistem kekerabatan, dan lain-lainnya.

Sedang penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian sebagai suatu karakter, ciri, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu³⁰.

²⁸ Winarno Surachmad, dasar dan teknik research, tarsito, bandung, 1987, hal. 139

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Op.cit. hal.4

2. Jenis Data

- a. Data Primer merupakan suatu data yang dikumpulkan ketika penelitian dalam hal ini data-datanya berkaitan tentang pelaksanaan fungsi partai politik yang diperoleh langsung dari masyarakat berupa jawaban terhadap pertanyaan di dalam kuesioner. Data ini penulis peroleh dari hasil pengamatan, survey serta wawancara atau memberi daftar pertanyaan langsung dari lapangan. Tetapi dalam penelitian ini pencarian data akan ditekankan pada penggunaan wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data pendukung untuk melengkapi data primer seperti dari buku-buku, makalah, jurnal, dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun data sekunder yang penulis pergunakan adalah dokumen-dokumen, artikel, foto-foto sebagai bukti kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman serta buku-buku acuan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi partai politik.

3. Unit Analisa Data

Sehubungan penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan fungsi partai politik maka unit analisis dalam penelitian ini adalah

- a) Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman
- b) Masyarakat Sleman

³⁰ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya), Kencana, Jakarta, 2007, hal. 68

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dapat dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tidak menggunakan pedoman (*guide*) wawancara³¹. Dimana wawancara ini dilakukan kepada Pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sleman antara lain sebagai berikut Ketua DPD PKS, Badan Pemenangan Pemilu Daerah (Bappilu), Wakil Sekretaris II (Kabiro Adm. Umum dan Pusat informasi PKS).

b. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri adalah kegiatan yang bersangkutan dengan dokumen tertentu. Dokumen adalah wahana seperti buku-buku, majalah pamphlet, dan foto-foto, rekaman suara sebagai rekaman dari komunikasi langsung.³²

Teknik dokumentasi ini dapat penulis lakukan dengan cara melihat foto, buku-buku, jurnal, catatan-catatan, laporan-laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Catatan-catatan dan laporan-laporan dapat diperoleh secara langsung dari kantor Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman.

³¹ Burhan Bungin, Op.cit, hal. 108

³² Sulistyio Basuki, Teknik dan Jasa Dokumentasi, Gramedia, Jakarta, 1992, hal.2

c. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang telah tersusun untuk masyarakat. Definisi kuesioner adalah sebagai metode pengumpulan data dari responden yang dilakukan melalui daftar pertanyaan dengan maksud memperoleh informasi yang relevan.³³ Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat untuk membuktikan pelaksanaan fungsi partai politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut peneliti sesuai dengan spesifikasi seperti tingkat pendidikan tertentu.

- a. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek yang di pelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Sleman yang telah memiliki hak pilih dan memiliki KTP Sleman.
- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai perwakilan untuk penelitian dan sampel ini dianggap sudah mewakili populasi.

³³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Op.cit hal. 117

Dalam penelitian, peneliti akan memakai *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel melalui pembatasan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian³⁴. Responden yang dipilih adalah masyarakat Kabupaten Sleman yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu, memiliki KTP Kabupaten Sleman dan berumur 17 tahun- 50 tahun (Identifikasi responden terdapat pada lampiran) . Alasan responden terpilih adalah orang yang sudah mempunyai hak pilih karena orang yang sudah mempunyai hak pilih akan memiliki kecenderungan memperhatikan perpolitikan yang sedang terjadi.

Menurut Roscoe sampel yang bisa mewakili populasi sebaiknya diambil lebih dari 30 dan kurang dari 500 serta jika sampel dibagi dalam sub sampel maka setiap kategori diperlukan minimum 30 sampel³⁵. Maka jumlah sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 50 sampel.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisirkannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

36

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif ini berusaha memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala dengan

³⁴ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal. 157

³⁵ M.Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Hanggar Kreator, Yogyakarta, 2008, hal. 132

³⁶ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 103.

menyimpulkan masalahnya. Sehingga analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain³⁷.

Sedangkan secara kuantitatif, adalah suatu metode yang berpangkat pada peristiwa yang dapat dinyatakan dengan angka-angka, indeks, rumus, dan sebagainya.

Rumus analisa Indeks :

$$I = \frac{(fa \times 5) + (fb \times 4) + (fc \times 3) + (fd \times 2) + (fe \times 1)}{N}$$

Keterangan :

I = Indeks

Fa = Frekuensi yang menjawab a

Fb= Frekuensi yang menjawab b

Fc = Frekuensi yang menjawab c

Fd = Frekuensi yang menjawab d

Fe = Frekuensi yang menjawab e

N = Jumlah Sampel

³⁷ Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, 1989, hal. 171

Dari pertanyaan dalam kuesioner terdapat lima pilihan jawaban yaitu A samapi E. Masing-masing rincian nilai sebagai berikut A nilainya 5, B nialinya 4, C nilainya 3, D nilainya 2, dan E nilainya 1.

Interval Indeks:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :

I = Besarnya interval

R = Jarak nilai tertinggi – nilai terendah

K = Jumlah kategori

$$I = \frac{5-1}{5}$$
$$I = 0,80$$

Jadi besarnya interval adalah 0,80

Maka keterangan penilaian :

Sangat baik : 4,21 – 5,00

Baik : 3,41 – 4,20

Cukup baik : 2,61 – 3,40

Kurang : 1,81 – 2,60

Sangat Kurang : 1,00 – 1,80

Dan untuk menentukan presentase dari jumlah jawaban yang telah diberikan responden digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan : P = Persentase

F = Frekuensi/nilai jawaban

n = Jumlah responden